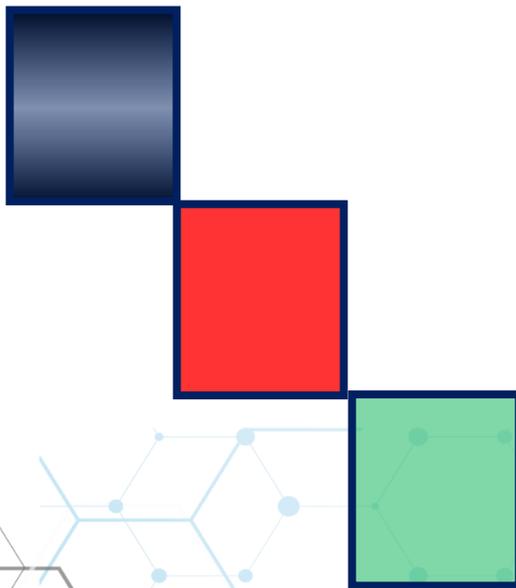




# LAPORAN EVALUASI TW II TAHUN 2024



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun untuk memenuhi kewajiban instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik dan bebas KKN.

Sangat disadari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disajikan belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimasa yang akan datang.

Malili, Juli 2024  
Kepala Dinas



**Drs. H. HAMRIS DARWIS**

Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19810511 199912 1 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB. I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Data Umum Organisasi .....	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Peran Organisasi.....	5
1.4 Isu Strategis .....	5
<b>BAB. II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Rencana Strategis .....	6
2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	8
2.3 Penetapan Kinerja.....	10
<b>BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>13</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	13
3.2 Realisasi Anggaran.....	36
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>40</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103), Dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Selanjutnya dalam rangka mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyusun Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja

dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 3 bulan ( Triwulan II Tahun 2024).

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun 2024 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis Triwulan II Tahun 2024 kepada stakeholders guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberikan mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada pada Triwulan II Tahun 2024 dan bagaimana proses pencapaiannya.

## **1.3 Kondisi/Struktur Organisasi**

Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistic dan persandian maka tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana yang termaktum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 84 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut: Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur serta Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dipimpin oleh

1. Sekretariat, terdiri dari 3 Sub Bagian:
  - a. Sub Bagian Perencanaan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Aplikasi dan Informatika terdiri:
  - a. Kepala Bidang;
  - b. Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda 1 orang;
3. Bidang Telematika dan Persandian terdiri:

- a. Kepala Bidang;
- b. Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda 2 orang;
- 4. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri:
  - a. Kepala Bidang;
  - b. Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda 1 orang;
- 5. Bidang Statistik terdiri:
  - a. Kepala Bidang;

Sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, maka dapat dilihat kondisi organisasi Tahun 2024 berdasarkan kepangkatan dan golongan, jabatan dan tingkat pendidikan.

**a. Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan**

Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Menurut Kepangkatan dan Golongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan**

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda, Gol IV.c	1 Orang
2	Pembina Tk. I , Gol. IV.b	1 Orang
3	Pembina Gol. IV.a	5 Orang
4	Penata Tk. I, Gol III.d	3 Orang
5	Penata , Gol III.c	4 Orang
6	Penata Muda Tk. I, Gol III.b	4 Orang
7	Penata Muda, Gol III.a	1 Orang
8	Pengatur Tk. I , Gol II.d	2 Orang
9	Pengatur, Gol II.c	1 Orang
10	PPPK	3 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>25 Orang</b>

**b. Berdasarkan Jabatan**

Berdasarkan Jabatan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	Eselon III.b	1 Orang

2	Eselon III.a	1 Orang
3	Eselon III.b	4 Orang
4	Eselon IV.a	3 Orang
5	Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda	3 Orang
6	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	1 Orang
7	Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda (PPPK)	3 Orang
8	Staf Pelaksana	9 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>25 Orang</b>

**c. Berdasarkan Pendidikan**

Tahun 2024 keadaan pegawai Dnas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Strata Dua (S2)	6 Orang
2	Strata Satu (S1)	14 Orang
3	D3	2 Orang
4	SMA/STM	3 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>25 Orang</b>

**1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian**

**1.4.1 Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103), Dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

**4.1.2 Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan Persandian.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan Persandian.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
4. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan Persandian.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan Persandian.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
4. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.5 Isu-isu Strategis/Permasalahan

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan, teridentifikasi beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi antara lain

1. Terdapat kegiatan teknis yang belum dibayarkan pada pihak ketiga karena belum ada penagihan.
2. Proses Pembayaran SPJ juga mengalami kendala karena keterbatasan UP sehingga mempengaruhi efektifitas daya serap anggaran.
3. Pengolahan data pada bidang statistic masih mengandalkan pihak ketiga karena keterbatasan SDM yang ahli dalam bidang statistic.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

#### 2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis atau disebut RENSTRA merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi, Visi, Misi Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya

RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RENSTRA secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting dan strategis dalam suatu organisasi. Dengan kata lain visi merupakan rekonstruksi keadaan yang diharapkan dapat dicapai dimasa yang akan datang.

#### 2.2. Visi dan Misi Tahun 2021 – 2026

Visi Misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mengacu pada visi misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kab. Luwu Timur tahun 2021-2026 yaitu **“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”** Dalam

rumusan visi initerkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni “berkelanjutan”, “lebih maju”, serta “berlandaskan nilai agama dan budaya”. Ketiga pokok visi ini salingterkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan.

Berkelanjutan mempunyai makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di dalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan dayadukung dan daya tampung lingkungan hidup

Lebih Maju Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar dimasa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah- langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi, namun diantara keenam misi tersebut yang terkait dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian adalah misi 4 (empat) seperti yang dapat dilihat dibawah ini:

**Misi Ke-4 RPJMD :**

***“Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik”***

**Tujuan Ke-4 RPJMD:**

***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani”***

**Tujuan Sasaran Strategis**

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah.

### **2.3 Sasaran Starategis dan Indikator Kinerja Utama**

Tujuan dan Sasaran Strategis Serta Target Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.**

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja Tahun 2024</b>
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3.10
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	96.56
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP Kominfo	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,51

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Adapun untuk mencapai tiga sasaran tersebut di atas perlu untuk ditetapkan indikator kinerja sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran utama pada renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 yakni sebagai berikut:

### 1. Indeks Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Penilaian SPBE dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahun. Evaluasi SPBE dilaksanakan dengan mendasarkan pada Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, semula penghitungan SPBE mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

### 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan *good governance* di suatu negara. Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan. Pengertian keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya. Manfaat keterbukaan informasi publik antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktik korupsi. Implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### 3. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP untuk Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dapat dilihat melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan serta dapat mempertanggungjawabkan hasil atas anggaran yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan. Indikator dari sasaran ini adalah Nilai SAKIP. Nilai SAKIP

tersebut diperoleh melalui opini yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap laporan SAKIP tahun-n.

## 2.4 Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan dalam hal ini tahun 2024.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis tahun 2024, Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2024.

Adapun Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Adapun Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Adapun Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana Tabel 5 dan Penetapan Target Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana Tabel 6.

Tabel 5.

### Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunkas Informatika Statistik dan Persandian Kerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Hasil evaluasi dari Kemenpan RB	Angka	3.10

2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Penilaian dari Komisi Informasi provinsi sulawesi Selatan	Angka	96.56
3	Nilai SAKIP Kominfo	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	78,51

Tabel 6.

**Penetapan Kinerja Program Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024**

No	Nama Program	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pengelolaan Urusan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	%	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Jumlah Informasi Publik yang dipublikasikan	Persentase Informasi daerah yang dipublikasikan	%	100
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika pemerintahan daerah	Persentase OPD yang memanfaatkan aplikasi informatika	%	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya penggunaan data statistik daerah untuk penggunaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase OPD yang mengakses data statistik untuk perumusan perencanaan perangkat daerah	%	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	Persentase kegiatan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah yang dilaksanakan	%	100

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

##### Pengukuran dan Analisis Kinerja

Secara Umum Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian memiliki 3 Indikator Kinerja Utama dengan 2 Sasaran.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melaksanakan kegiatannya. Efisien diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau lebih dari target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan efisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Efektifitas adalah perbandingan antara rasio pencapaian outcome dengan ratio pencapaian output dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektif jika pencapaian outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian output, sedangkan in-efektif disebabkan pencapaian outcome lebih rendah dari pada pencapaian output.

TUJUAN I : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

<b>1</b>	<b><u>Sasaran Startegis 1</u></b> Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik
----------	--

Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik adalah merupakan Usaha untuk meningkatkan penggunaan atau penerapan digitalisasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan dari

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang arsitektur Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Nasional.

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah Nilai akhir dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB).

❖ **Capaian Kinerja sasaran Strategis :**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun		Capaian
			Target 2024	Realisasi 2023	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Angka	3.10	3,05	98.39

Capaian Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2023 yaitu 3.05 dari target 2.50 atau dengan tingkat capaian 122 %. Realisasi Kinerja sasaran Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik pada TW II Tahun 2024 masih menggunakan realisasi capaian Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena capaian untuk penilaian evaluasi Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2024 dilakukan pada TW IV Tahun 2024.

❖ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2022			2023		Capaian
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi 2023	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Angka	2,25	2,42	107%	2,50	3.05	122%

Tahun 2022 adalah 2,42 atau predikat Cukup, dimana target awal adalah 2,25. Selanjutnya pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mencapai peningkatan dan bahkan melebihi target yang telah ditentukan yaitu

mencapai 3,05 atau 122% dari tahun sebelumnya. Terdapat kenaikan capaian kinerja sebesar 15 % dari tahun sebelumnya.

❖ **Perbandingan Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah**

Target akhir Renstra Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu 3.05 Sementara Untuk Capaian Realisasi Tahun 2024 Triwulan II masih menggunakan capaian Realisasi Akhir Tahun 2023 yakni 3,05 Sehingga Tingkat capaian terhadap target akhir Renstra yaitu 101%. Capaian Tahun 2023 telah melampaui target jangka menengah ( Tahun 2026) sebesar 0.5 poin.

Tabel 7.

**Perbandingan Antara Capaian Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2023		Capaian	Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Target	Realisasi			
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	persen	2,50	3,05	122% %	3	101%

❖ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja**

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis Elektronik antara lain :

- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
- Kerjasama yang baik dengan semua Organisasi perangkat daerah, puskesmas dan BPP dalam pelayanan koneksi jaringan internet.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut antara lain :

- Kurang sumber daya aparatur yang menguasai Teknik keamanan jaringan
- Kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung keamanan penggunaan Aplikasi.

Alternatif solusi yang dilakukan dalam pencapaian target sasaran tersebut antara lain :

- Diharapkan dengan adanya aplikasi yang telah disediakan saat ini agar dibuatkan dasar hukumnya agar dapat diimplementasikan.

- Melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan aplikasi di lingkup OPD yang menerapkan aplikasi tersebut.
- Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur yang ada saat ini dengan lebih sering melakukan pelatihan teknis terkait kegiatan tersebut
- Penambahan personil yang ahli di bidang jaringan dan TIK.

#### ❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW II TAHUN 2024	REALISASI ANGGARAN S.D 30 JUNI 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>2.966.106.000</b>	<b>1.688.916.000</b>	<b>1.338.769.490</b>	<b>79,27</b>
01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.435.735.500	1.280.545.500	985.170.150	76,93
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	69.886.000	36.926.000	16.130.600	43,68
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.365.849.500	1.243.619.500	969.039.550	77,92
02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	530.370.500	408.370.500	353.599.340	86,59
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	402.708.400	327.708.400	292.973.990	89,40
	Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	127.662.100	80.662.100	60.625.350	75,16
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>300.179.400</b>	<b>246.147.500</b>	<b>222.500.650</b>	<b>90,39</b>
01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	300.179.400	246.147.500	222.500.650	90,39
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	50.271.000	27.511.000	9.846.660	35,79
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	249.908.400	218.636.500	212.653.990	97,26
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>89.839.000</b>	<b>52.550.000</b>	<b>24.972.000</b>	<b>47,52</b>
01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	89.839.000	52.550.000	24.972.000	47,52
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	89.839.000	52.550.000	24.972.000	47,52
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>3.356.124.400</b>	<b>1.987.613.500</b>	<b>1.586.242.140</b>	<b>79,80</b>

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Pagu Anggaran Perubahan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan DPA Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur yang mendukung Sasaran I yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis

Elektronik sebesar Rp 3.356.124.400,- terealisasi sebesar Rp.1.987.613.500,- atau capaian 79,80 %.

❖ **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik**

Terdapat 3 (Tiga) program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis Elektronik yaitu :

**1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Adapun beberapa indikator yang menunjang pencapaian program pengelolaan aplikasi informatika yaitu ini :

1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi Internet

Target Perangkat Daerah yang direncanakan terkoneksi internet pada Tahun 2024 adalah 41 Perangkat Daerah, target triwulanan 41 Perangkat Daerah dan realisasi 41 Perangkat Daerah atau capaian 100%. Persentase capaian tetap setiap triwulannya. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah OPD yang terakses internet / Jumlah keseluruhan OPD x 100%)”.

2. Persentase ruang publik yang terkoneksi internet

Target ruang publik yang direncanakan terkoneksi internet pada tahun 2024 adalah sebanyak 21 unit area publik dengan rincian 10 ruang publik yang ada di ibu kota kabupaten dan 11 di ibu kota kecamatan. Untuk target triwulan II adalah 21 area publik dan realisasi triwulan II adalah 21 area publik atau 100%. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Ruang Publik yang terakses internet / Jumlah Ruang Publik yang menjadi sasaran pemasangan jaringan internet x 100%)”.

3. Persentase Puskesmas yang terkoneksi Internet

Target Jumlah Puskesmas yang direncanakan terkoneksi internet pada tahun 2024 adalah sebanyak 17 Puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di kabupaten Luwu Timur. Untuk target triwulan II adalah 17 Puskesmas dan realisasi triwulan II adalah 17 Puskesmas atau 100%. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Puskesmas yang terakses internet / Jumlah keseluruhan Puskesmas yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.

#### 4. Persentase BPP yang terkoneksi Internet

Target Jumlah BPP yang direncanakan terkoneksi internet pada tahun 2024 adalah sebanyak 11 BPP. Untuk target triwulan II adalah 11 BPP dan realisasi triwulan II adalah 11 BPP atau 100%. Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :“(Jumlah BPP yang terakses internet / Jumlah BPP yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.

#### 5. Persentase Rumah Dinas Jabatan yang terkoneksi Internet

Target jumlah rumah dinas jabatan yang menjadi target pemasangan jaringan internet kominfo pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 Rumah Dinas Jabatan yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dengan rincian 5 titik yaitu 1 Rujab Bupati, 1 Rujab Wakil Bupati, 1 Rujab Ketua DPRD, 1 Rujab Wakil Ketua I DPRD, 1 Rujab Wakil Ketua II DPRD. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Rumah Dinas Jabatan yang terakses internet / Jumlah Rumah Dinas Jabatan yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.

#### 6. Persentase Aplikasi E- Government yang dibangun

Target jumlah Aplikasi E-Government yang direncanakan dibangun pada tahun 2024 adalah sebanyak 8 unit (aplikasi). Untuk target triwulan II adalah 3 unit (aplikasi) dan telah terealisasi sebanyak 3 aplikasi atau sebesar % .Adapun aplikasi yang telah dibangun yaitu Pengembangan aplikasi SIM-PKM, Pembangunan aplikasi database inovasi dan aplikasi pendataan kebun kelapa sawit rakyat. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Aplikasi E-Government yang dibangun / Jumlah Jumlah Aplikasi E-Government yang direncanakan dibangun x 100%)”.

## 2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Indikator yang menunjang pencapaian program pengelolaan aplikasi informatika yaitu Persentase OPD yang mengakses data statistik sektoral daerah untuk perencanaan pembangunan. Untuk OPD yang mengakses data statistik sektoral daerah untuk perencanaan pembangunan ditargetkan pada tahun 2024 sebanyak 41 perangkat daerah. Untuk triwulan II pelaksanaan kegiatan ini telah terealisasi 100%. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :“( Jumlah OPD yang

*menggunakan data statistik sektoral daerah dalam perencanaan pembangunan / Jumlah OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur)”*

### **3. Program Penyelenggraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

Indikator yang menunjang pencapaian program Penyelenggraan Persandian untuk Pengamanan Informasi adalah persentase kegiatan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan. Target pada Tahun 2024 untuk Kegiatan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah yang adalah sebanyak 41 perangkat daerah. Target untuk triwulan II adalah 41 perangkat daerah dan telah terealisasi 100% untuk triwulan II. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“( *Jumlah Aplikasi perangkat daerah yang diamankan / Jumlah perangkat daerah.*

Adapun capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan pendukung tersebut antara lain :

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja 2024	Target Kinerja TW II	Realisasi Kinerja TW II	% Capaian Realisasi Kinerja TW II
<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pengelolaan Domain dan Sub domain se Kabupaten Luwu Timur	100	50	50	50
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0	0
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra Pemerintah daerah	95 unit	95 unit	95 unit	100
<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pengelolaan Aplikasi EGovernment yang Dilaksanakan Lingkup Pemerintah Daerah	100	50	50	50
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	8 Unit (aplikasi)	2 unit (aplikasi)	2 Unit (aplikasi)	100
Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	0	0	0
<b>Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan	100	0	0	0

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	10 Dokumen	0	0	0
Membangun metadata	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	0	0	0
<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase informasi Pemerintah Daerah yang diamankan	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	41 perangkat Daerah	41 perangkat Daerah	41 perangkat Daerah	100

Perbandingan capaian kinerja triwulan I dan II sama karena semua kegiatan dan sub kegiatan terealisasi sesuai rencana aksi, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja 2024	Target TW I	Real TW I	% Capaian TW I	Target TW II	Real TW II	% Capaian TW II	Perbandingan
<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pengelolaan Domain dan Sub domain se Kabupaten Luwu Timur	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0%</b>
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	

Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra Pemerintah daerah	95 unit	95 Unit	95 unit	100	95 unit	95 unit	100	
<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pengelolaan Aplikasi EGovernment yang Dilaksanakan Lingkup Pemerintah Daerah	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	8 Unit (aplikasi)	3 unit (aplikasi)	3 unit (aplikasi)	100	2 unit (aplikasi)	2 Unit (aplikasi)	100	
Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	
<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	10 Dokumen	0	0	0	0	0	0	
Membangun metadata	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	
<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase informasi Pemerintah Daerah yang diamankan	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	41 perangkat Daerah	41 PD	41 PD	100	41 PD	41 PD	100	

1	<b><u>Sasaran Startegis 2</u></b> Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
---	--

Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik merujuk pada proses atau kondisi di mana akses masyarakat terhadap informasi yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga publik semakin terbuka dan transparan. Tujuan utama dari meningkatnya keterbukaan informasi publik adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah.

❖ **Capaian Kinerja sasaran Strategis :**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun		Capaian
			Target 2024	Realisasi 2023	
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	96,56	96,55	99.98

Capaian Nilai keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yaitu 96,55 dari target 87 atau dengan tingkat capaian 110 %. Realisasi Kinerja sasaran Nilai keterbukaan Informasi Publik pada TW II Tahun 2024 masih menggunakan realisasi capaian Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena capaian untuk penilaian evaluasi Nilai keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dilakukan pada TW IV Tahun 2024.

❖ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Pada Tahun 2022 target nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah 85, realisasi nilai nya 93,84 atau capaian sebesar 110% dibandingkan dengan tahun 2023 target 87, realisasi 96.55 atau capaian sebesar 111%. Mengalami kenaikan sebesar 1 % dari tahun sebelumnya.

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2022			2023		Capaian
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	85	93,84	110%	87	96.55	111%

❖ **Perbandingan Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah**

Target akhir Renstra Nilai Keterbukaan Informasi Publik yaitu 92 Sementara Untuk Capaian Tahun 2024 Triwulan II masih menggunakan capaian Akhir Tahun 2023 yakni 96.55 Sehingga Tingkat capaian terhadap target akhir Renstra yaitu 104% Capaian Tahun 2023 telah melampaui target jangka menengah ( Tahun 2026) sebesar 6 poin.

Tabel 8.

Perbandingan Antara Capaian Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2023		Capaian	Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Target	Realisasi			
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	persen	87	96.55	110%	92	104%

Adapun indikator kinerja yang menunjang pencapaian Sasaran Strategis II dalam rangka meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik disajikan dalam tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Tahun 2024		
	Target	Realisasi TW II	Capaian TW II
Jumlah informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terpublikasi	9.100 Informasi	3.739	41%

#### ❖ Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik antara lain :

- Tersedianya sarana dan prasarana informasi yang memadai
- ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan masyarakat Umum secara aktif menerima, memanfaatkan dan menyebarluaskan informasi
- Kerjasama yang baik dengan semua Pers dalam hal penyebaran informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut antara lain :

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas

Alternatif solusi yang dilakukan dalam pencapaian target sasaran tersebut antara lain:

- Memaksimalkan realisasi sesuai target yang telah ditentukan sehingga pelaksanaan program/kegiatan sesuai target perencanaan
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan kewajiban khususnya media partner yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Luwu Timur.

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW II TAHUN 2024	REALISASI ANGGARAN S.D TANGL 30 Juni 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	3.410.595.920	1.964.871.625	1.263.240.804	64,29
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	3.410.595.920	877.344.175	1.263.240.804	64,29
	1 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	82.749.925	47.184.925	26.906.700	57,02
	2 Pelayanan Informasi Publik	129.640.250	91.317.250	25.179.246	27,57
	3 Layanan Hubungan Media	3.170.882.450	1.819.687.450	1.211.154.858	66,56
	4 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	27.323.295	6.682.000	-	0,00
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>3.410.595.920</b>	<b>1.964.871.625</b>	<b>1.263.240.804</b>	<b>64,29</b>

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Pagu Anggaran Perubahan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan DPA Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur yang mendukung Sasaran II yaitu Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik sebesar Rp, 3.410.595.920- dengan realisasi triwulan II sebesar Rp. 1.964.871.625,- atau dengan tingkat capaian 64,29 %.

❖ **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik**

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yaitu program Informasi dan Komunikasi Publik yang diukur dengan indicator kinerja Persentase Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah daerah yang dikelola.

Adapun capaian indicator kegiatan dan sub kegiatan pendukung Program Informasi dan Komunikasi Publik yaitu :

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja 2024	Target TW II	Realisasi Kinerja TW II	% Capaian Realisasi Kinerja TW II
<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Informasi Pemerintah Daerah Yang Dipublikasikan Melalui Media dan Kelompok Informasi Masyarakat	100	25	25	25
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	0	0	0
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	0	0	0
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	30 Layanan	30 Layanan	30 Layanan	100
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	71 Orang	0	0	0

Perbandingan capaian kinerja triwulan I dan II sama karena semua kegiatan dan sub kegiatan terealisasi sesuai rencana aksi, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja 2024	Target TW I	Realisasi Kinerja TW I	% Capaian	Target TW II	Realisasi Kinerja TW II	% Capaian	Perbandingan
<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Informasi Pemerintah Daerah Yang Dipublikasikan Melalui Media dan Kelompok Informasi Masyarakat	100	25	25	100	25	25	100	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	30 Layanan	30 layanan	30 layanan	30 layanan	30 Layanan	30 Layana n	100	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	71 Orang	0	0	0	0	0	0	

TUJUAN II : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah.

<b>3</b>	<b>Sasaran III</b> Meningkatnya Nilai Sakip
----------	--

Sasaran Strategis dari 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mewujudkan pelayanan umum yang Prima untuk mengukur sasaran yang ketiga ini.

❖ **Capaian Kinerja Sasaran Strategis :**

Indikator dari Sasaran 3 adalah Nilai SAKIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan target indikator yaitu 78,51. Realisasi dari sasaran ini belum dapat tercapai pada Triwulan II karena sementara menunggu penilaian dari Tim

Evaluasi SAKIP Inspektorat. Nilai SAKIP ini berdasarkan penilaian dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

❖ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Pada Tahun 2022 target nilai Nilai SAKIP adalah 63, realisasi nilai nya 64.40 atau capaian sebesar 102% dibandingkan dengan tahun 2023 target 64, realisasi 78,50 atau capaian sebesar 122% Mengalami kenaikan sebesar 20 poin dari tahun sebelumnya.

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2022			2023		Capaian
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	
Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	63	64.40	102%	64	78.50	122%

❖ **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah**

Tabel 9.

Perbandingan Antara Capaian Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2023			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP	persen	64	78.50	122%	70	112%

Dari Data diatas dapat dilihat bahwa Target Nilai LAKIP Dinas Kominfo – SP pada akhir tahun Renstra (target Jangka Menengah) yaitu 70 sementara realisasi sampai dengan tahun 2023 sebesar 78.50 atau dengan Tingkat capaian kinerja terhadap target akhir Renstra sebesar 112% Pada Triwulan II Tahun 2024 Nilai SAKIP Dinas Kominfo - SP untuk Tahun 2024 belum rilis dari Inspektorat sehingga data capaian kinerja Sasaran 3 masih menggunakan data capaian Tahun lalu.

❖ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja**

a) **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja**

- Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan dengan baik;
- Tersusunnya agenda perencanaan dan penganggaran berdasarkan aturan

Permendagri 54 Tahun 2010 dan Permendagri 86 tahun 2017

- Tersedianya laporan keuangan dan aset yang dibutuhkan dalam audit atau pemeriksaan;

**b) Analisis Penyebab Kegagalan/ Penurunan Kinerja**

- Belum Optimalnya Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
- Peralatan dan Perlengkapan kantor belum memadai
- Pengarsipan dokumen yang belum berbasis aplikasi
- Kurangnya kesadaran aparatur dalam hal penegakan disiplin;

**c) Strategi/upaya pemecahan masalah :**

- Diperlukan sistem pengarsipan surat menyurat serta Dokumen lainnya yang berbasis Aplikasi
- Monitoring dan Evaluasi terhadap program dan kegiatan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan setiap triwulan
- Melakukan pendataan barang-barang asset kantor secara kontinu sehingga barang yang sudah tidak layak dalam hal operasional kantor dapat dilakukan penghapusan aset dan melakukan penggantian barang yang di usulkan pada tahun anggaran selanjutnya;

❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN II (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 30 JUNI 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.163.171.235</b>	<b>3.441.159.193</b>	<b>2.282.981.535</b>	<b>66,34</b>
1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>119.480.455</b>	<b>71.045.455</b>	<b>61.029.610</b>	<b>85,90</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.099.450	18.809.450	12.845.270	68,29
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.214.450	1.314.450	1.262.350	96,04
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.300.600	1.525.600	926.340	60,72
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.865.955	49.395.955	45.995.650	93,12
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.920.676.348</b>	<b>2.490.635.306</b>	<b>1.642.941.944</b>	<b>65,96</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.855.245.348	2.445.068.306	1.612.728.709	65,96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65.431.000	45.567.000	30.213.235	66,31
3	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>29.486.800</b>	<b>13.794.800</b>	<b>7.735.500</b>	<b>56,08</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	29.486.800	13.794.800	7.735.500	56,08
4	<b>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	200.000	200.000	-	0,00
5	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>74.804.682</b>	<b>72.028.632</b>	<b>42.479.250</b>	<b>58,98</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.244.682	30.468.632	18.376.750	60,31
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	41.560.000	41.560.000	24.102.500	57,99
6	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>304.737.950</b>	<b>227.800.000</b>	<b>215.898.805</b>	<b>94,78</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.520.000	4.500.000	2.150.000	47,78
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.183.950	6.500.000	3.369.540	51,84
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.500.000	4.500.000	3.758.310	83,52
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	1.300.000	880.000	67,69
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.250.000	16.000.000	12.480.000	78,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.364.000	195.000.000	193.260.955	99,11
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>293.850.000</b>	<b>161.100.000</b>	<b>124.831.926</b>	<b>77,49</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	1.300.000	1.000.000	76,92
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.600.000	66.800.000	46.331.926	69,36
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.000.000	93.000.000	77.500.000	83,33
8	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>263.045.000</b>	<b>263.045.000</b>	<b>111.270.000</b>	<b>42,30</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.000.000	112.000.000	111.270.000	99,35

	Pengadaan Mebel	10.500.000	10.500.000	-	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.000.000	139.000.000	-	0,00
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	1.545.000	1.545.000	-	0,00
<b>9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>156.890.000</b>	<b>141.510.000</b>	<b>76.794.500</b>	<b>54,27</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.380.000	60.000.000	11.189.500	18,65
	pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	61.510.000	61.510.000	57.575.000	93,60
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	20.000.000	20.000.000	8.030.000	40,15
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>4.163.171.235</b>	<b>3.441.159.193</b>	<b>2.282.981.535</b>	<b>66,34</b>

Anggaran yang ditetapkan pada APBD-Pokok yang mendukung pencapaian sasaran strategis III ini sebesar Rp 4.163.171.235.- dengan realisasi anggaran untuk TW II sebesar Rp 3.441.159.193,- atau 66,34% dari pagu anggaran.

❖ **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Nilai SAKIP**

Adapun kegiatan dan sub kegiatan pendukung sasaran meningkatnya nilai SAKIP yaitu :

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024	Realisasi Kinerja TW II	Realisasi Kinerja TW II	% Capaian TW II
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran &amp; evaluasi tepat waktu</b>	100	25	25	25
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	1	1	100
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik</b>	100	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	22	22	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	2	2	100
<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)</b>	100	0	0	0

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0
<b>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1	0	0	0
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18	5	5	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	5	5	100
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	1	1	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	1	1	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	1	1	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4	1	1	100

Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	1	1	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	1	1	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik</b>	<b>100</b>	100	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	1	1	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	1	1	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	1	1	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	0	0	0
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	5	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor/ bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	0	0	0

	yang Disediakan				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik</b>	100	25	25	25
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	2	2	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	3	3	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	1	100

Perbandingan capaian kinerja triwulan I dan II sama karena semua kegiatan dan sub kegiatan terealisasi sesuai rencana aksi, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Targe t Kinerj a 2024	Targe t TW I	Real TW I	% Capai an	Targe t TW II	Real TW II	% Capai an	Perba nding an
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran &amp; evaluasi tepat waktu</b>	100	25	25	25	25	25	25	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	0	0	0	1	1	100	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	0	0	0	0	0	0	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	1	1	100	0	0	0	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	6	6	100	1	1	100	
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik</b>	<b>100</b>							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	22	22	100	22	22	100	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	4	4	100	2	2	100	
<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	0	0	0	
<b>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1	0	0	0	0	0	0	
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani</b>	<b>100</b>							
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18	3	3	100	5	5	100	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	2	2	100	5	5	100	
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar</b>	<b>100</b>							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	1	1	100	1	1	100	

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	1	1	100	1	1	100	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	1	1	100	1	1	100	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	1	1	100	1	1	100	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	1	1	100	1	1	100	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	1	1	100	1	1	100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik</b>	<b>100</b>							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	1	1	100	1	1	100	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	1	1	100	1	1	100	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	1	1	100	1	1	100	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	0	0	0	0	0	0	

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	5	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor/ bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	1	1	100	2	2	100	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	2	2	100	3	3	100	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	1	100	1	1	100	

### 3.2 Realisasi Anggaran

Tahun 2024 pada Triwulan II pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur dianggarkan melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah (APBD) dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp **10.929.891.555,-**, sedangkan realisasi pada Triwulan II sebesar Rp **5.132.464.479,-** atau setara dengan capaian 46,96%. Target Anggaran Kas pada Triwulan II sebesar Rp. **7.394.644.318,-** sehingga capaian realisasi anggaran berdasarkan target anggaran kas yaitu 69,42%. Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 10**

Rincian Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 Triwulan II

NO	PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASIING - MASIING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN II (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 30 JUNI 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						(6/5*100)	(5 - 6)	(8/5*100)	(4 - 6)	(10/4*100)
01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		4.163.171.235	3.441.159.193	2.282.981.535	66,34	1.158.177.658	33,66	1.880.189.700	45,16
1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	119.480.455	71.045.455	61.029.610	85,90	10.015.845	14,10	58.450.845	48,92
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		56.099.450	18.809.450	12.845.270	68,29	5.964.180	31,71	43.254.180	77,10
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3.214.450	1.314.450	1.262.350	96,04	52.100	3,96	1.952.100	60,73
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		3.300.600	1.525.600	926.340	60,72	599.260	39,28	2.374.260	71,93
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		56.865.955	49.395.955	45.995.650	93,12	3.400.305	6,88	10.870.305	19,12
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	2.920.676.348	2.490.635.306	1.642.941.944	65,96	847.693.362	34,04	1.277.734.404	43,75
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.855.245.348	2.445.068.306	1.612.728.709	65,96	832.339.597	34,04	1.242.516.639	43,52
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		65.431.000	45.567.000	30.213.235	66,31	15.353.765	33,69	35.217.765	53,82
3	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	29.486.800	13.794.800	7.735.500	56,08	6.059.300	43,92	21.751.300	73,77
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		29.486.800	13.794.800	7.735.500	56,08	6.059.300	43,92	21.751.300	73,77
4	<b>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	ARIEF FADILLAH, S.Kom	200.000	200.000	-	0,00	200.000	100,00	200.000	100,00
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah		200.000	200.000	-	0,00	200.000	100,00	200.000	100,00
5	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	74.804.682	72.028.632	42.479.250	58,98	29.549.382	41,02	32.325.432	43,21
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		33.244.682	30.468.632	18.376.750	60,31	12.091.882	39,69	14.867.932	44,72

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan		41.560.000	41.560.000	24.102.500	57,99	17.457.500	42,01	17.457.500	42,01
<b>6</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>ANDRIE FIRDAUS, S.Sos</b>	<b>304.737.950</b>	<b>227.800.000</b>	<b>215.898.805</b>	<b>94,78</b>	<b>11.901.195</b>	<b>5,22</b>	<b>88.839.145</b>	<b>29,15</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.520.000	4.500.000	2.150.000	47,78	2.350.000	52,22	3.370.000	61,05
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		9.183.950	6.500.000	3.369.540	51,84	3.130.460	48,16	5.814.410	63,31
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		6.500.000	4.500.000	3.758.310	83,52	741.690	16,48	2.741.690	42,18
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.920.000	1.300.000	880.000	67,69	420.000	32,31	1.040.000	54,17
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		31.250.000	16.000.000	12.480.000	78,00	3.520.000	22,00	18.770.000	60,06
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		250.364.000	195.000.000	193.260.955	99,11	1.739.045	0,89	57.103.045	22,81
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>ANDRIE FIRDAUS, S.Sos</b>	<b>293.850.000</b>	<b>161.100.000</b>	<b>124.831.926</b>	<b>77,49</b>	<b>36.268.074</b>	<b>22,51</b>	<b>169.018.074</b>	<b>57,52</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.250.000	1.300.000	1.000.000	76,92	300.000	23,08	1.250.000	55,56
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		105.600.000	66.800.000	46.331.926	69,36	20.468.074	30,64	59.268.074	56,13
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		186.000.000	93.000.000	77.500.000	83,33	15.500.000	16,67	108.500.000	58,33
<b>8</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>ANDRIE FIRDAUS, S.Sos</b>	<b>263.045.000</b>	<b>263.045.000</b>	<b>111.270.000</b>	<b>42,30</b>	<b>151.775.000</b>	<b>57,70</b>	<b>151.775.000</b>	<b>57,70</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		112.000.000	112.000.000	111.270.000	99,35	730.000	0,65	730.000	0,65
	Pengadaan Mebel		10.500.000	10.500.000	-	0,00	10.500.000	100,00	10.500.000	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		139.000.000	139.000.000	-	0,00	139.000.000	100,00	139.000.000	100,00
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya		1.545.000	1.545.000	-	0,00	1.545.000	100,00	1.545.000	100,00
<b>9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>ANDRIE FIRDAUS, S.Sos</b>	<b>156.890.000</b>	<b>141.510.000</b>	<b>76.794.500</b>	<b>54,27</b>	<b>64.715.500</b>	<b>45,73</b>	<b>80.095.500</b>	<b>51,05</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		75.380.000	60.000.000	11.189.500	18,65	48.810.500	81,35	64.190.500	85,16
	pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		61.510.000	61.510.000	57.575.000	93,60	3.935.000	6,40	3.935.000	6,40
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		20.000.000	20.000.000	8.030.000	40,15	11.970.000	59,85	11.970.000	59,85

02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		<b>3.410.595.920</b>	<b>1.964.871.625</b>	<b>1.263.240.804</b>	<b>64,29</b>	<b>701.630.821</b>	<b>35,71</b>	<b>2.147.355.116</b>	<b>62,96</b>
1	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>HAYATI ILYAS, SE.MM</b>	<b>3.410.595.920</b>	<b>1.964.871.625</b>	<b>1.263.240.804</b>	<b>64,29</b>	<b>701.630.821</b>	<b>35,71</b>	<b>2.147.355.116</b>	<b>62,96</b>
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		82.749.925	47.184.925	26.906.700	57,02	20.278.225	42,98	55.843.225	67,48
	Pelayanan Informasi Publik		129.640.250	91.317.250	25.179.246	27,57	66.138.004	72,43	104.461.004	80,58
	Layanan Hubungan Media		3.170.882.450	1.819.687.450	1.211.154.858	66,56	608.532.592	33,44	1.959.727.592	61,80
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		27.323.295	6.682.000	-	0,00	6.682.000	100,00	27.323.295	100,00
03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>		<b>2.966.106.000</b>	<b>1.688.916.000</b>	<b>1.338.769.490</b>	<b>79,27</b>	<b>350.146.510</b>	<b>20,73</b>	<b>1.627.336.510</b>	<b>54,86</b>
1	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>ARIEF FADILLAH, S.Kom</b>	<b>2.435.735.500</b>	<b>1.280.545.500</b>	<b>985.170.150</b>	<b>76,93</b>	<b>295.375.350</b>	<b>23,07</b>	<b>1.450.565.350</b>	<b>59,55</b>
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		69.886.000	36.926.000	16.130.600	43,68	20.795.400	56,32	53.755.400	76,92
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		2.365.849.500	1.243.619.500	969.039.550	77,92	274.579.950	22,08	1.396.809.950	59,04
2	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>MUHAMMAD ADI SAFAAT, S.Kom</b>	<b>530.370.500</b>	<b>408.370.500</b>	<b>353.599.340</b>	<b>86,59</b>	<b>54.771.160</b>	<b>13,41</b>	<b>176.771.160</b>	<b>33,33</b>
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		402.708.400	327.708.400	292.973.990	89,40	34.734.410	10,60	109.734.410	27,25
	Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		127.662.100	80.662.100	60.625.350	75,16	20.036.750	0,00	67.036.750	0,00
04	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>300.179.400</b>	<b>246.147.500</b>	<b>222.500.650</b>	<b>90,39</b>	<b>23.646.850</b>	<b>9,61</b>	<b>77.678.750</b>	<b>25,88</b>
1	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>HAERUDDIN, S.Kom</b>	<b>300.179.400</b>	<b>246.147.500</b>	<b>222.500.650</b>	<b>90,39</b>	<b>23.646.850</b>	<b>9,61</b>	<b>77.678.750</b>	<b>25,88</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		50.271.000	27.511.000	9.846.660	35,79	17.664.340	64,21	40.424.340	80,41
	Membangun Metadata Statistik Sektoral		249.908.400	218.636.500	212.653.990	97,26	5.982.510	2,74	37.254.410	14,91
05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		<b>89.839.000</b>	<b>52.550.000</b>	<b>24.972.000</b>	<b>47,52</b>	<b>27.578.000</b>	<b>52,48</b>	<b>64.867.000</b>	<b>72,20</b>

1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ARIEF FADILLAH, S.Kom	89.839.000	52.550.000	24.972.000	47,52	27.578.000	52,48	64.867.000	72,20
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		89.839.000	52.550.000	24.972.000	47,52	27.578.000	52,48	64.867.000	72,20
<b>TOTAL BELANJA</b>			<b>10.929.891.555</b>	<b>7.393.644.318</b>	<b>5.132.464.479</b>	<b>69,42</b>	2.261.179.839	30,58	5.797.427.076	53,04

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan II Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 merupakan dokumen yang memuat tentang capaian kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur pada triwulan II Tahun Anggaran 2024. Dokumen ini memberi gambaran tentang capaian dari setiap target yang direncanakan, serta kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target.

Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan ini dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya serta dapat memberi gambaran langkah-langkah percepatan pencapaian target yang telah direncanakan untuk tahun 2024. Laporan Kinerja Triwulanan ini sangat mempermudah dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.

Semoga Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Malili, Juli 2024

KEPALA DINAS,



**Drs. H. Hamris Darwis**

Pangkat :Pembina Utama Muda

NIP. :196411191990031008

***L***

***A***

***M***

***P***

***I***

***R***

***A***

***N***

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK  
DAN PERSANDIAN

Telepon : (0474) 321 337 Faks : (0474) 321 337  
Email: [kominfo@luwutimurkab.go.id](mailto:kominfo@luwutimurkab.go.id)

Malili, 17 Juli 2024 ✓

Nomor : 000.1.1/S24/Diskominfo-SP  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan ✓

Kepada  
Yth. Sekretaris, Kasubag, Kabid,  
dan Staf ✓

di-  
Tempat ✓

Dalam rangka pencapaian target kinerja Triwulan II TA 2024, maka di undang kepada saudara/i untuk menghadiri rapat yang Inshaallah akan dilaksanakan:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juli 2024 ✓

Waktu : 09.30 Wita - Selesai ✓

Tempat : Ruang Bidang Telematika, Informatika Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur. ✓

Demikian disampaikan perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS  
SEKRETARIS  
HERPIK SKM.M.Kes ✓  
Pangkat Pembina Tk. I/IV-b  
NIP. 19660814 198903 1 016

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) *di Malili*;
2. Ketua DPRD Luwu Timur *di Malili*;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, *di Malili*

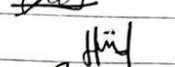
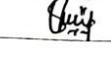
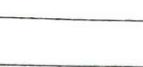
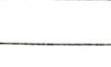
**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor. 11 Malli 92981  
 Telepon : (0474) 321 337 Faks : (0474) 321 337  
 Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**DAFTAR HADIR**

Hari/Tanggal : Rabu 17-7-2024 ✓  
 Agenda : Evaluasi Kinerja Tm II ✓  
 Tempat : Ruang Bidang Telekomatika ✓

NO.	NAMA	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1				
2				
3	Andiwe Firdaus	Kasubag. Perencanaan	L	
4	Ratna Nasir	Ps. Pratkan Ahli Muda	P	
5	MUVE XUNIT AHMAD	Ps. Pratkan Humas At mid	P	
6	A. Pamudeng	Staf	L	
7	A. Indrawati Adnan	Kasubag keuangan	P.	
8	Muh. Akbar Syarif	Staf	L	
9	MASHI	Staf	P	
10	Albertha	Staf	P	
11	Aunisa adei	Staf IKP Humas	P	
12	Dewi Satrika	Staf IKP	P	
13	Selvy	Staf	P	
14	Nabila N	Staf IKP Humas		
15	Enhana Taibratunnisa	Staf IKP Humas	P	
16	Besse Iu Nabila	Staf IKP Humas	P	
17	LESTAKI	Staf	P	
18	Rabika Islamia	Staf	P	
19	Suhendra	Staf	L	
20	Nouita Sari	Staf	P	

NO.	NAMA	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
21	Deh Setiawan	Staf Aptika	L	
22	Abdron Nur Alam Nassirah	Staf Aptika	L	
23	Rahmi Tambay	Staf Aptika	P	
24	Nur Helma	—	P	
25	Resky Fauzia	Staf IKP & Humas	P	
26	A. Suhmawati	Staf Telekomika	L	
27	Herdiyanti	Staf Sekretariat	P	
28	ASIA	Staf	P	
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
3				
4				
5				
5				
7				





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN  
PERSANDIAN**

Email : [kominfo@luwutimurkab.go.id](mailto:kominfo@luwutimurkab.go.id)

---

**PERNYATAAN TELAH DI EVALUASI ATAS KINERJA KEPALA  
DINAS BIDANG SEKRETARIATAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Sekretariat atas pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Subtansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil evaluasi kami ~~terdapat~~/ tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, Juli 2024

**Kepala Dinas,**

**Drs. H. HAMRIS DARWIS**

Pangkat/Gol.: Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19641119 199003 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN**  
**PERSANDIAN**

Email : [kominfo@luwutimurkab.go.id](mailto:kominfo@luwutimurkab.go.id)

---

**PERNYATAAN TELAH DI EVALUASI ATAS KINERJA KEPALA**  
**DINAS BIDANG STATISTIK TRIWULAN II TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Sekertariat atas pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Subtansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil evaluasi kami ~~terdapat~~/ tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, Juli 2024

**Kepala Dinas,**

**Drs. H. HAMRIS DARWIS**

Pangkat/Gol.: Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19641119 199003 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN**  
**PERSANDIAN**

Email : [kominfo@luwutimurkab.go.id](mailto:kominfo@luwutimurkab.go.id)

---

**PERNYATAAN TELAH DI EVALUASI ATAS KINERJA KEPALA**  
**DINAS BIDANG INFORMASI KOUNIKASI PUBLIK TRIWULAN II**  
**TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Sekertariat atas pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Subtansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil evaluasi kami ~~terdapat~~/ tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, Juli 2024

**Kepala Dinas,**

**Drs. H. HAMRIS DARWIS**

Pangkat/Gol.: Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19641119 199003 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN  
PERSANDIAN**

Email : [kominfo@luwutimurkab.go.id](mailto:kominfo@luwutimurkab.go.id)

---

**PERNYATAAN TELAH DI EVALUASI ATAS KINERJA KEPALA  
DINAS BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA TRIWULAN II  
TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Sekertariat atas pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Subtansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil evaluasi kami ~~terdapat~~/ tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, Juli 2024

**Kepala Dinas,**

**Drs. H. HAMRIS DARWIS**

Pangkat/Gol.: Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19641119 199003 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN  
PERSANDIAN**

Email : [kominfo@luwutimurkab.go.id](mailto:kominfo@luwutimurkab.go.id)

---

**PERNYATAAN TELAH DI EVALUASI ATAS KINERJA KEPALA  
DINAS BIDANG TELEMATIKA TRIWULAN II TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Sekertariat atas pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Subtansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil evaluasi kami ~~terdapat~~/ tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, Juli 2024

**Kepala Dinas,**

**Drs. H. HAMRIS DARWIS**

Pangkat/Gol.: Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19641119 199003 1 008